

ABSTRAK

Lahan basah merupakan ekosistem krusial yang menjadi habitat bagi satwa liar endemik, termasuk Bekantan (*Nasalis larvatus*) di Indonesia dan Pateke (*Anas chlorotis*) di Selandia Baru. Sebagai negara pihak dalam Konvensi Ramsar, kedua negara memiliki kewajiban internasional untuk melakukan perlindungan terhadap ekosistem tersebut. Namun, tantangan degradasi habitat dan fragmentasi lahan tetap menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan satwa endemik ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan implementasi hukum Konvensi Ramsar dalam perlindungan Bekantan di Indonesia dan Pateke di Selandia Baru, serta mengkaji adaptasi model tata kelola konservasi Selandia Baru untuk memperkuat kerangka hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas perlindungan, di mana Selandia Baru telah mengintegrasikan kearifan lokal (*Kaitiakitanga*) ke dalam instrumen hukum nasional secara lebih koheren dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi di Indonesia melalui pelembagaan tata kelola konservasi trilateral dan integrasi prinsip keadilan ekologis guna menjamin kelestarian habitat lahan basah bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: Konvensi Ramsar, Bekantan, Pateke, Konservasi Lahan Basah, Studi Komparatif.

ABSTRACT

*Wetlands are crucial ecosystems that serve as habitats for endemic wildlife, including the Proboscis Monkey (*Nasalis larvatus*) in Indonesia and the Pateke (*Anas chlorotis*) in New Zealand. As contracting parties to the Ramsar Convention, both countries bear international obligations to protect these ecosystems. However, challenges such as habitat degradation and land fragmentation remain serious threats to the survival of these endemic species. This study aims to analyze the comparative implementation of the Ramsar Convention in protecting the Proboscis Monkey in Indonesia and the Pateke in New Zealand, as well as to examine the adaptation of New Zealand's conservation governance model to strengthen the legal framework in Indonesia. The approach used in this research is normative legal research, utilizing secondary data obtained through literature review and a comparative approach. The results indicate significant differences in protection effectiveness, where New Zealand has integrated local wisdom (*Kaitiakitanga*) into its national legal instruments more coherently than Indonesia. Therefore, regulatory strengthening in Indonesia is required through the institutionalization of trilateral conservation governance and the integration of ecological justice principles to ensure the sustainability of wetland habitats for future generations.*

Keywords: *Ramsar Convention, Proboscis Monkey, Pateke, Wetland Conservation, Comparative Study.*